

# PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

# PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2018



# PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

ISBN : 978 - 602 - 6544 - 58 - 2  
Nomor Publikasi : 13520.1905  
Katalog : 4301003.13  
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 62

**Naskah** : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Barat

**Penyunting** : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Barat

**Gambar Kulit** : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Barat

**Ilustrasi Cover dan Gambar/Pembatas** : <http://www.freepik.com>

**Diterbitkan Oleh** : © Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

**Dicetak Oleh** : CV. Graphic Dwipa (Cetakan I)

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)**

# PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

## **Anggota Tim Penyusun:**

**Pengarah** : Dr. Ir. Sukardi, M.Si

**Penanggung Jawab** : Krido Saptono, S.Si, M.Si

**Editor** : Krido Saptono, S.Si, M.Si  
Imam Teguh Raharto, S.Si, M.Si  
Ir. Yunimarlita  
Lidya Sriyeni, S.ST. M.Si  
Sumi Lestari, S.Si

**Penulis** : Dr. Rita Diana, S.Si, M.Si

**Pengolah Data** : Dr. Rita Diana, S.Si, M.Si



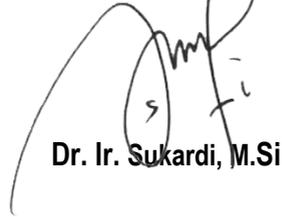
## KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2018 merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan data pendidikan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memuat informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, melek huruf, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah dan angka putus sekolah.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan pemerintah pusat/daerah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan atau program-program pembangunan di bidang pendidikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2019

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Barat,



Dr. Ir. Sukardi, M.Si



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
BAB I                   PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	5
1.3. Sumber Data dan Metodologi .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II                 METODOLOGI .....	7
2.1. Sumber Data .....	9
2.2. Konsep dan Definisi .....	9
BAB III               SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN .....	15
3.1. Latar Belakang .....	17
3.2. Partisipasi Pendidikan .....	20
3.3. Pendidikan Anak Usia Dini .....	22
3.4. Partisipasi Sekolah .....	28
3.5. Angka Partisipasi Sekolah.....	31
3.6. Angka Partisipasi Kasar .....	35
3.7. Angka Partisipasi Murni .....	38
BAB IV                HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN .....	41
4.1. Angka Melek Huruf .....	44
4.2. Rata-Rata Lama Sekolah .....	46
4.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan .....	48
4.4. Angka Putus Sekolah .....	50
BAB V                 PENUTUP .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	59



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1.1	: Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2017-2018	18
Tabel 3.1.2	: Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2018	19
Tabel 3.3.1	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-5 tahun dan 3-6 tahun di Sumatera Barat, 2018	26
Tabel 3.3.2	: Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-5 tahun dan 3-6 tahun di Sumatera Barat, 2018	27
Tabel 3.4	: Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat, 2018	30
Tabel 3.5	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2018	33
Tabel 3.6	: Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2018	36
Tabel 3.7	: Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2018	39
Tabel 4.1	: Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2018	44
Tabel 4.4	: Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Sumatera Barat, 2018	51



<b>Gambar</b>	<b>Daftar Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 3.3	: Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2017/2018 Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat	24
Gambar 3.5	: Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2018	32
Gambar 4.2	: Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2018	46
Gambar 4.3.1	: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2018	48
Gambar 4.3.2	: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2018	49



# PENDAHULUAN

Indikator Pendidikan menjadi  
monitoring pembangunan  
pendidikan



" UUD 1945 Pasal 31"

tiap tap Warga Negara  
berhak mendapat  
**pengajaran**

<https://sumahapsido.id>

## SDGs Tujuan 4

Menjamin kualitas  
pendidikan yang  
inklusif dan merata  
serta meningkatkan  
kesempatan belajar  
sepanjang hayat untuk  
semua





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan dalam arti luas adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef, 2012).

Tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya pada tujuan keempat yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Untuk mewujudkannya pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam perbaikan pendidikan bangsa, yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyiratkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup, dengan makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik.

Disamping itu, kemajuan teknologi juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan menjadi faktor penting agar ada kecocokan antara pendidikan dan lapangan kerja sehingga pengangguran dapat berkurang. Mutu pendidikan dapat diukur melalui ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki standar kompetensi guru.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan misalnya dengan mengalokasikan data untuk sektor pendidikan, memberikan tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Untuk memantau perkembangan pembangunan

manusia dalam bidang pendidikan dapat dilihat dengan pendekatan indikator pendidikan. Indikator pendidikan yang akan dibahas antara lain, kemampuan intelektual dasar yang meliputi Angka Partisipasi untuk PAUD, Angka Melek Huruf (AMH) dan *Mean Years of Schooling* (MYS) atau rata-rata lama sekolah, partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

## 1.2. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan pokok penulisan Publikasi "Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2018", yaitu:

1. Untuk mengetahui indikator proses pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 yang diwakili dengan data tentang sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah guru, sekolah dan murid.
2. Untuk mengetahui indikator hasil pembangunan di bidang pendidikan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat 2018 yang diwakili dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan rata-rata lama sekolah.

## 1.3. Sumber Data dan Metodologi

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret. Selain

itu digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan yang disajikan dalam indikator pendidikan ini menggunakan metode analisis deskriptif baik untuk Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah perdesaan dan perkotaan, golongan pengeluaran serta perbandingan antar jenis kelamin.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/definisi yang digunakan penulisan publikasi.
- Bab III menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang sarana dan prasarana pendidikan yang memuat dua bahasan utama yaitu, partisipasi pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah dasar dan menengah.
- Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan pendidikan yang tercermin dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selain itu indikator angka putus sekolah juga disajikan untuk melihat adanya hambatan/kegagalan pembangunan pendidikan.
- Bab V penutup, berisi ringkasan tentang kondisi pendidikan penduduk Sumatera Barat secara umum.

# METODOLOGI



<https://sumbar.bps.go.id>



## BAB 2 METODOLOGI

### 2.1. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

### 2.2. Konsep dan Definisi

Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

**Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.

**Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Konsep satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

**Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau

orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

**Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

**Tidak termasuk anggota rumah tangga** yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

**Rasio murid-guru** adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

**Rasio kelas-guru** adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru.

**Rasio murid-kelas** adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

**Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan PT.

**Pendidikan non formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

**Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

**Partisipasi sekolah** yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

- **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- **Masih bersekolah** adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.
- **Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

**Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

**Pendidikan pra sekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

**Pendidikan kesetaraan** adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.

**Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

**Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

**Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

**SD/MI** meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

**SMP/MTs** meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

**SMA/MA** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

**PT** meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

**Dapat membaca dan menulis**, artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

- **Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin;
- **Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;
- **Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

**Tidak dapat membaca dan menulis**, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

**Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

**Rata-Rata Lama Sekolah** adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

**Angka Putus Sekolah (APTs)** adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

<https://sumbar.bps.go.id>

# SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN



Perkembangan jumlah sekolah (%)

**PAUD**  
-1,97

**SMP**  
0,83

**SD**  
0,51

**SMA**  
0,13



Partisipasi Sekolah Murni



SD /  
Sederajat

SMP /  
Sederajat

SMA /  
Sederajat

PT  
(19-24)

**98,66**

**77,08**

**67,48**

**27,89**

" 7 dari 10 anak usia 16-18 tahun bersekolah sesuai pada jenjangnya yaitu SMA/ sederajat "



## BAB 3

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### 3.1. Latar Belakang

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Barat akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah sekolah, murid dan guru.

Tabel 3.1.1 memperlihatkan perkembangan jumlah sekolah dua tahun terakhir. Semua jenjang pendidikan mengalami kenaikan jumlah bangunan sekolah, kecuali pada jenjang pendidikan PAUD/sejenisnya. Kenaikan tertinggi pada jenjang pendidikan menengah, yaitu SMP/ sederajat (0,83 persen), SD/ sederajat (0,51 persen) dan SMA/ sederajat (0,13 persen). Sedangkan PAUD/sejenis mengalami pengurangan jumlah bangunan sebesar 1,97 persen.

Pertumbuhan jumlah sekolah biasanya diiringi dengan peningkatan jumlah murid. Berdasarkan data

**Tabel 3.1.1. Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2017-2018**

Lembaga	Jumlah/Orang 2016/2017	Jumlah/Orang 2017/2018	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PAUD/Sejenis</b>			
- Jumlah TK	4 973	4 875	-1,97
- Jumlah Murid	138 761	138 418	-0,25
- Jumlah Guru	11 620	11 158	-3,98
<b>SD/Sederajat</b>			
- Jumlah SD/ sederajat	4 310	4 332	0,51
- Jumlah Murid	661 751	653 250	-1,28
- Jumlah Guru	43 024	42 325	-1,62
<b>SMP/Sederajat</b>			
- Jumlah SMP/ sederajat	1 207	1 217	0,83
- Jumlah Murid	303 221	298 350	-1,61
- Jumlah Guru	25 790	25 520	-1,05
<b>SMA/ sederajat</b>			
- Jumlah SMA/ sederajat	749	750	0,13
- Jumlah Murid	262 316	263 405	0,42
- Jumlah Guru	23 023	22 093	-4,04

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2017-2018 (olahan)

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama dua tahun terakhir, pertumbuhan jumlah murid tertinggi adalah pada jenjang SMA/ sederajat, yaitu bertambah 0,42 persen. Sementara itu, persentase pertumbuhan murid jenjang pendidikan PAUD/ sejenis, SD/ sederajat dan SMP/ sederajat justru menurun. Dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, jumlah murid SD/ sederajat turun sekitar 1,28 persen dan jumlah SMP/ sederajat turun sekitar 1,61 persen.

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan juga dapat dilihat dari nilai rasio murid-kelas. Rasio murid per kelas mencerminkan jumlah murid dalam satu kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar ideal rasio murid-kelas

menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017 adalah pada jenjang SD/ sederajat, satu kelas layaknya terdiri dari 20-28 murid, jenjang SMP/ sederajat satu kelas layaknya 20-32 murid dan jenjang SMA/ sederajat satu kelas terdiri 20-36 murid. Dari Tabel 3.1.2 terlihat bahwa rasio murid per kelas pada semua jenjang pendidikan sudah sesuai dengan standar ideal.

**Tabel 3.1.2. Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2018**

Jenjang Pendidikan	Jumlah			Rasio		
	Murid	Guru	Kelas	Murid Guru	Kelas Guru	Murid Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ sederajat	653 250	42 325	31 163	15	0,74	21
SMP/ sederajat	298 350	25 520	12 140	12	0,48	25
SMA/ sederajat	263 405	22 093	9 761	12	0,44	27

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2018 (olahan)

Kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh beban kerja guru. Beban kerja guru dapat diukur melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru ialah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru (baik guru layak mengajar maupun tidak) pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Semakin besar rasio murid-guru, semakin kecil akses murid terhadap guru. Secara umum dapat diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil (UNESCO, 2009). Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa menjadi lebih baik dan dapat menjadikan suasana belajar mengajar yang nyaman sehingga hasil belajar mengajarnya

lebih optimal. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disebutkan bahwa jenjang SD, SMP dan SMA idealnya 1 guru bertanggung jawab pada 20 murid. Sedangkan pada jenjang TK, MI, MTs, MA idealnya 1 guru bertanggung jawab terhadap 15 murid. Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada Tabel 3.1.2 menunjukkan bahwa secara rata-rata pada setiap jenjang pendidikan, seorang guru bertanggung jawab terhadap 12 sampai 15 murid. Rasio murid-guru semua jenjang pendidikan untuk TA 2018/2019 sudah memenuhi standar ideal sesuai dengan peraturan pemerintah.

### 3.2. Partisipasi Pendidikan

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 3 dan pasal 31. Pemenuhan hak tersebut juga sejalan dengan tujuan SDGs keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan pada RPJMN 2015-2019 adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, dengan target sasaran tahun 2019 sebagai berikut (BPS, 2018 ):

- Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD sebesar 77,2 persen
- Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI sebesar 94,8 persen
- Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/

MI/SDLB/Paket A sebesar 114,1 persen

- APM jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 82,0 persen
- APK jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 106,9 persen
- APM jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/ sebesar 67,5 persen
- APK jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 91,6 persen
- APK jenjang pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 36,7 persen.

Target yang ditetapkan pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi daerah yang dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera” (Bappeda, 2016). Visi ini didukung oleh 5 misi yang akan dicapai pada akhir masa pemerintahan Gubernur Irwan Prayitno yang berakhir di tahun 2021. Pada misi ke-3 yang berbunyi “ Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi” terdapat 2 tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.

Masing-masing tujuan punya target kinerja yang akan dicapai sampai tahun 2021. Beberapa indikator pendidikan tujuan 1 pada misi ke-3 menargetkan akan mencapai nilai rata-rata

lama sekolah tahun 2018 sebesar 8,72 tahun. Pada tujuan 2, beberapa target pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah APK PAUD sebesar 72,18 persen, APM SD sebesar 99,60 persen, APM SMP sebesar 81,30 persen, APM SMA sebesar 73,85 persen, dan APTs (Angka Putus Sekolah) SMA sebesar 0,73 persen.

Untuk memantau sejauh mana program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah akan dapat menyamai renstra nasional dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui indikator pendidikan yang diolah dari data Susenas 2018 seperti indikator partisipasi sekolah.

Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2018 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

### 3.3. Pendidikan Anak Usia Dini

Berbagai penelitian mengungkapkan pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan karakter anak-anak. Para psikolog, neurosains, dan pakar pendidikan pun mengamini hal ini. Salah satunya Robert Fulghum (2018), pendidik dan penulis asal Amerika Serikat, mengatakan, fondasi karakter anak dapat dibangun sejak mereka masuk pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pendidikan yang diberikan untuk anak usia 3-6 tahun

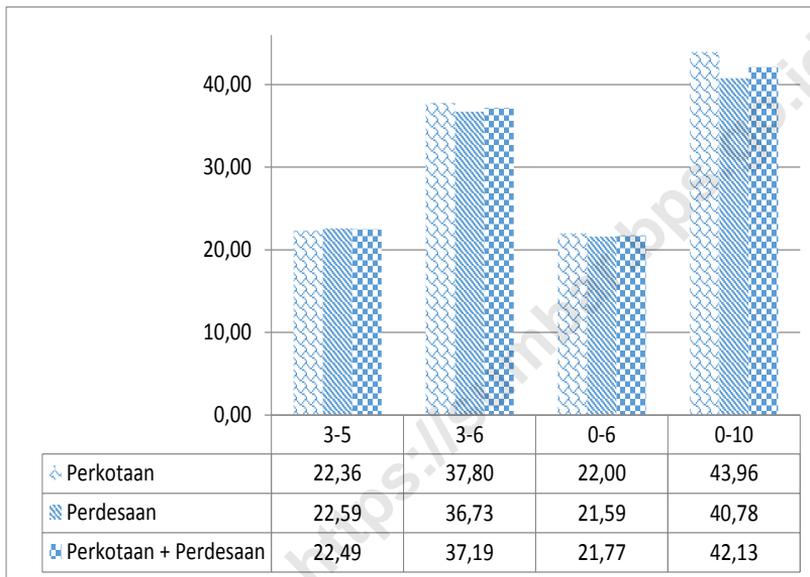
tidak hanya bertujuan mengenalkan anak pada bidang-bidang pelajaran ataupun melatihnya berinteraksi dengan anak sebaya. Lebih jauh dari itu, PAUD memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional.

Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Selanjutnya, dalam peningkatan mutu kelembagaan PAUD, pemerintah mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hal-hal mengenai syarat pendirian PAUD, standar tingkat pencapaian pengembangan anak pada PAUD, standar isi, proses, dan penilaian PAUD, tenaga pendidik, hingga proses penutupan PAUD telah diatur secara lengkap pada peraturan tersebut. Pemerintah juga telah merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD.

Pengalaman belajar di PAUD akan membantu anak untuk lebih siap dalam menerima pelajaran formal di bangku

pendidikan selanjutnya (SD) sehingga sedikit anak yang mengulang kelas. Hal ini yang menjadi salah satu alasan UNESCO merekomendasikan setiap anak mendapatkan pendidikan anak usia dini pada usia pra sekolah. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal



Sumber: Susenas Maret 2018

**Gambar 3.3. Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pra Sekolah Tahun Ajaran 2017/2018 Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat**

(TK/RA/ sederajat), non formal (KB/TPA/sejenisnya), dan/atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra-SD.

Dari Gambar 3.3, pada tahun 2018 persentase anak usia 0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah di Sumatera Barat telah mencapai 21,77 persen. Berdasarkan tipe daerah, partisipasi pra sekolah di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu 22,00 persen

berbanding 21,59 persen dengan selisih hanya sebesar 0,41 persen pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa usaha pemerintah Sumatera Barat dalam meningkatkan fasilitas pra sekolah membaik, namun tetap perlu ditingkatkan.

Selain partisipasi PAUD, publikasi ini juga menyajikan indikator lain terkait PAUD yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang dapat dilihat dalam Tabel 3.3.1 dan Tabel 3.3.2. APK PAUD merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, baik Taman Kanak-Kanak (TK)/Bushtanul Athfal (BA)/Raudhatul Athfal (RA) maupun berbagai jenis PAUD lainnya (kecuali kelompok bermain dan tempat penitipan anak), terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang bersesuaian.

Pada perhitungan APK PAUD dan APM PAUD menggunakan dua kelompok umur yaitu 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Perbedaan tersebut dilakukan karena kelompok umur 3-5 tahun sesuai dengan penetapan UNESCO dalam penghitungan indikator pendidikan usia dini, sedangkan kelompok umur 3-6 tahun sesuai yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019. Oleh karena itu, agar keterbandingan keduanya tetap dapat dicermati, maka pengelompokan kedua jenis kelompok umur tetap dilakukan.

Dalam mewujudkan penyediaan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk seluruh anak laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, pemerintah pusat dan daerah telah menyusun agenda pendidikan secara berkesinambungan. Pada tahun 2018, APK PAUD di Sumatera Barat untuk kelompok umur 3-6 tahun sebesar 30,22 persen. Hal ini menandakan bahwa

**Tabel 3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun di Sumatera Barat, 2018**

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	
	Usia 3-5 tahun	Usia 3-6 tahun
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>	<b>43,04</b>	<b>32,08</b>
Laki-Laki	41,69	31,03
Perempuan	44,41	33,16
<b>Perdesaan</b>	<b>38,98</b>	<b>28,83</b>
Laki-Laki	36,69	27,04
Perempuan	41,29	30,64
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>40,73</b>	<b>30,22</b>
Laki-Laki	38,84	28,75
Perempuan	42,63	31,72

Sumber: Susenas Maret 2018

dari 10 anak usia 3-6 tahun, setidaknya terdapat 3-4 anak diantaranya mengenyam pendidikan anak usia dini. Angka ini masih cukup jauh di bawah target pembangunan yaitu sebesar 77,2 persen pada tahun 2019.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APK PAUD anak perempuan baik kelompok umur 3-5 tahun maupun 3-6 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan APK PAUD anak laki-laki dengan perbedaan sekitar 3-4 persen. Menurut tipe daerah, terdapat kesenjangan APK PAUD daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 43,04 persen berbanding 38,98 persen untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 32,08 persen berbanding 28,83 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Masih terdapatnya perbedaan APK PAUD antara perkotaan dan perdesaan menandakan bahwa akses dan fasilitas PAUD terutama di daerah perdesaan perlu lebih ditingkatkan sehingga masyarakat di perdesaan juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan PAUD.

**Tabel 3.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun di Sumatera Barat, 2018**

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	
	Usia 3-5 tahun	Usia 3-6 tahun
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>	<b>21,67</b>	<b>31,89</b>
Laki-Laki	18,2	30,83
Perempuan	25,17	32,96
<b>Perdesaan</b>	<b>21,13</b>	<b>28,49</b>
Laki-Laki	18,09	26,81
Perempuan	24,19	30,19
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>21,36</b>	<b>29,95</b>
Laki-Laki	18,14	28,53
Perempuan	24,61	31,38

Sumber: Susenas Maret 2018

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang benar-benar mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. Sejalan dengan APK PAUD, pada kelompok umur 3-5 tahun, APM PAUD anak perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yaitu 24,61 persen berbanding 18,14 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur 3-6 tahun, APM PAUD anak perempuan (31,38 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (28,53 persen).

Kesadaran orang tua untuk lebih memilih memasukkan anaknya, khususnya yang berusia 6 tahun, pada pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar mulai meningkat. Hal ini terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara APM PAUD usia 3-5 tahun dan APM PAUD

usia 3-6 tahun. Perbedaan tersebut menandakan bahwa kontribusi anak usia 6 tahun terhadap murid PAUD secara keseluruhan cukup besar. Di sisi lain, orang tua banyak yang lebih memahami bahwa usia 7 tahun merupakan usia ideal anak secara fisik maupun psikis untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, APM PAUD pada kelompok umur 3-5 tahun dan kelompok umur 3-6 tahun di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Tingginya persentase ibu pekerja serta mobilitas ibu rumah tangga di daerah perkotaan cenderung mendorong mereka untuk menitipkan anak ke tempat yang menyediakan pendidikan untuk anak usia dini sehingga anak tetap berada dalam pengawasan dan juga mendapatkan pendidikan PAUD.

Pada kelompok umur 3-5 tahun, selisih APK dan APM PAUD cenderung besar yaitu sekitar 19,37 persen, sedangkan untuk kelompok umur 3-6 tahun APK dan APM PAUD cenderung tidak berbeda signifikan. Hal ini juga mendukung pernyataan masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya yang berusia 6 tahun ke PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar.

### 3.4. Partisipasi Sekolah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan ilmu teknologi yang terjadi secara terus menerus. Dengan pendidikan yang baik akan dihasilkan tenaga kerja yang andal dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memacu pembangunan di berbagai

bidang. Dengan pendidikan yang baik juga akan meningkatkan daya saing anak bangsa dalam kancah pergaulan global.

Memanfaatkan fasilitas pendidikan terbuka untuk semua penduduk, tidak hanya pada kelompok penduduk usia sekolah saja. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,24 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 29,30 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 65,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan. Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (5,68 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (4,69 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan, dan

**Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat, 2018**

Tipe Daerah / Jenis	Kelamin	Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal			Jumlah
		Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan</b>		<b>4,69</b>	<b>31,60</b>	<b>63,71</b>	<b>100,00</b>
Laki-Laki		4,48	31,33	64,19	100,00
Perempuan		4,90	31,86	63,24	100,00
<b>Perdesaan</b>		<b>5,68</b>	<b>27,49</b>	<b>66,83</b>	<b>100,00</b>
Laki-Laki		5,00	27,81	67,19	100,00
Perempuan		6,35	27,17	66,48	100,00
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>		<b>5,24</b>	<b>29,30</b>	<b>65,45</b>	<b>100,00</b>
Laki-Laki		4,77	29,36	65,87	100,00
Perempuan		5,71	29,25	65,04	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan. Hal tersebut, tentunya perlu perhatian pemerintah yang lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (31,60 persen) relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (27,49 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan (63,71 persen) lebih rendah dibandingkan penduduk di perdesaan (66,83 persen).

Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa

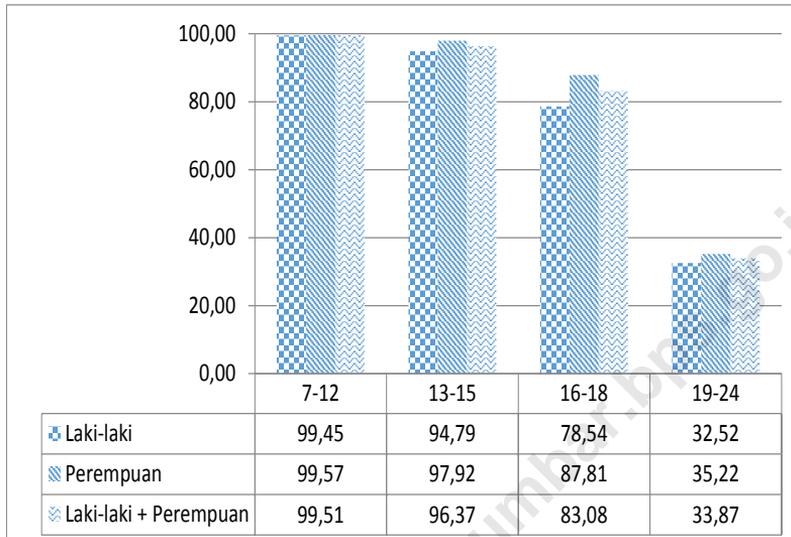
secara keseluruhan persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (5,71 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (4,77 persen). Kesenjangan terhadap akses pendidikan antar jenis kelamin cenderung terjadi di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 4,90 persen relatif sama dengan penduduk laki-laki yakni sebesar 4,48 persen. Sementara di daerah perdesaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,35 persen lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 5,00 persen. Ini mengindikasikan bahwa di daerah perdesaan akses pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan cenderung tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan di daerah perkotaan.

### 3.5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal seseorang. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi

penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.



Sumber: Susenas Maret 2018

**Gambar 3.5. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2018**

Gambar 3.5 memperlihatkan data APS menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Barat tahun 2018. Berdasarkan kelompok umurnya, APS terbesar yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,51 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun yang menandakan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Terlihat pula APS untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat relatif kecil yakni sekitar 83,08 persen anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke sekolah menengah, di saat negara kita sedang gencar mengusahakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh

**Tabel 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2018**

Tipe daerah / Status ekonomi rumah tangga	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan</b>	<b>99,53</b>	<b>97,18</b>	<b>88,87</b>	<b>50,18</b>
40 % terendah	99,48	95,63	82,15	34,61
40 % sedang	99,33	98,00	90,14	42,25
20 % tinggi	99,95	98,39	94,25	65,86
<b>Perdesaan</b>	<b>99,50</b>	<b>95,78</b>	<b>78,50</b>	<b>17,63</b>
40 % terendah	99,46	94,96	75,87	18,10
40 % sedang	99,55	95,73	79,92	15,84
20 % tinggi	99,49	99,92	86,19	22,44
<b>Perkotaan dan perdesaan</b>	<b>99,51</b>	<b>96,37</b>	<b>83,08</b>	<b>33,87</b>
40 % terendah	99,47	95,19	77,91	23,89
40 % sedang	99,46	96,74	84,48	27,49
20 % tinggi	99,79	99,02	91,85	55,88

Sumber: Susenas Maret 2018

rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki untuk semua kelompok umur.

Menurut tipe daerah, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 19-24 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi, dengan perbedaan sekitar 33 persen.

Jika dilihat lebih dalam, ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan memang masih sedikit, selain itu biaya pendidikan yang relatif tinggi kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan

sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja.

Lebih lanjut, Tabel 3.5 menyajikan APS menurut kelompok umur dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut terlihat bahwa APS anak usia sekolah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini terlihat pada APS di kelompok umur 7-12 tahun, kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun. Pada ketiga kelompok umur ini, APS untuk anak-anak yang berasal dari pengeluaran rumah tangganya sedang dan tinggi lebih tinggi dibandingkan APS untuk anak-anak yang pengeluaran rumah tangganya rendah.

Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 99,46 persen dan 99,79 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 96,74 persen dan 99,02 persen. Untuk kelompok umur 16-18 tahun dengan pengeluaran rumah tangga sedang dan tinggi, APS-nya berturut-turut 84,48 persen dan 91,85 persen. Ketimpangan yang cukup tinggi terdapat pada APS dengan kelompok umur 19-24 tahun, dimana APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 27,49 persen dan 55,88 persen.

Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama. Terlihat di daerah perkotaan bahwa semakin meningkat pengeluaran rumah tangga maka semakin meningkat pula APS anak usia sekolah. Pola tersebut terjadi di semua

kelompok umur pendidikan. Pola berbeda terjadi di daerah perdesaan. Pada kelompok umur 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun, APS tertinggi berada pada kelompok pengeluaran rumah tangga kategori tinggi. Namun pada kelompok umur 7-12 tahun di daerah perdesaan, APS tertinggi berada pada kelompok pengeluaran rumah tangga kategori sedang yakni sebesar 99,55 persen.

### 3.6. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Pada Tabel 3.6 terlihat APK untuk SD/ sederajat secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, di daerah perkotaan maupun perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam

pendidikan SD/ sederajat masih ada yang berada di luar *range* 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia SD (7-12 tahun). Hal ini terjadi karena masih ada orang tua yang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, atau karena masih tingginya yang tinggal kelas atau mengulang kelas.

**Tabel 3.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2018**

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar			
	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan</b>	<b>108,32</b>	<b>96,17</b>	<b>88,83</b>	<b>59,19</b>
Laki-Laki	109,65	93,18	81,95	57,27
Perempuan	106,93	99,03	95,63	61,01
<b>Perdesaan</b>	<b>112,91</b>	<b>87,10</b>	<b>80,12</b>	<b>14,53</b>
Laki-Laki	113,43	87,97	73,44	12,53
Perempuan	112,36	86,25	87,37	16,68
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>110,99</b>	<b>90,92</b>	<b>83,97</b>	<b>36,81</b>
Laki-Laki	111,85	90,15	77,10	34,19
Perempuan	110,08	91,68	91,11	39,45

Sumber: Susenas Maret 2018

Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga akan semakin rendah. APK SMP/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 90,92 persen. Walaupun angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 90,40 persen, namun target pemenuhan RPJMN untuk tahun 2019 masih cukup jauh yaitu mencapai 106,9 persen untuk APK SMP/ sederajat. Begitu juga APK SD/ sederajat (110,99 persen) dan

APK SMA/ sederajat (83,97 persen), yang masih harus ditingkatkan demi tercapainya APK SD/ sederajat yaitu 114,1 persen dan APK SMA/ sederajat 91,6 persen sesuai target RPJMN 2019. Berbeda dengan SD, SMP dan SMA, APK PT 19-24 tahun (yang dipakai pada RPJMN) juga sudah melampaui target 2019 (36,7 persen) yang telah mampu mencapai 36,81 persen.

Di Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan. Hal ini terlihat dari data APK laki-laki dan perempuan yang cenderung tidak terdapat perbedaan yang berarti. Hanya pada jenjang SD sederajat, APK SD laki-laki (111,85 persen) lebih tinggi sedikit dibandingkan perempuan (110,08 persen). Sedangkan pada jenjang SMP, SMA dan PT, APK perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Fakta ini mengindikasikan bahwa para perempuan yang mengenyam pendidikan di SMP, SMA dan perguruan tinggi tidak terbatas pada rentang usia 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA dan 19-24 tahun untuk PT saja, akan tetapi banyak dari mereka yang berada di luar rentang tersebut tetap memiliki semangat dalam menuntut ilmu pada tingkat SMP, SMA dan tingkat pendidikan tinggi.

Secara umum, APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, kecuali pada jenjang SD/ sederajat. Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Di daerah perkotaan, APK SMP/ sederajat sebesar 96,17 persen, APK SMA/ sederajat sebesar 88,83 persen dan APK PT sebesar 59,19 persen. Untuk daerah perdesaan, APK SMP/ sederajat sebesar 87,10 persen dan APK SMA/ sederajat sebesar 80,12 persen. Sementara itu pada jenjang SD/ sederajat, APK daerah perdesaan (112,91%) lebih tinggi daripada daerah perkotaan (108,32%). Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi

murid SD di perdesaan yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih besar daripada di perkotaan. Ini menunjukkan sistem pendidikan SD/ sederajat di perkotaan lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

### 3.7. Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 3.7 menunjukkan APM jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan APM jenjang perguruan tinggi. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya

**Tabel 3.7. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2018**

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan</b>	<b>97,74</b>	<b>79,68</b>	<b>70,57</b>	<b>43,99</b>
Laki-Laki	98,46	76,43	65,35	41,97
Perempuan	96,99	82,80	75,74	45,91
<b>Perdesaan</b>	<b>99,31</b>	<b>75,18</b>	<b>65,03</b>	<b>11,87</b>
Laki-Laki	99,08	73,00	57,97	10,36
Perempuan	99,56	77,32	72,68	13,48
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>98,66</b>	<b>77,08</b>	<b>67,48</b>	<b>27,89</b>
Laki-Laki	98,82	74,43	61,15	25,67
Perempuan	98,48	79,65	74,06	30,13

Sumber: Susenas Maret 2018

bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Namun, jika disandingkan dengan target capaian dari APM SD/ sederajat yang terdapat di dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2015-2019, nilai capaian APM SD/ sederajat pada tahun 2018 belum melampaui target RPJMD tahun 2019 yaitu sebesar 98,66 persen belum melampaui 99,60 persen yang merupakan target tahun berakhirnya RPJMD 2015-2019.

Dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK pada tahun 2018. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM untuk setiap jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan cenderung sama dan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender di bidang pendidikan khususnya di Sumatera Barat bukan lagi

karena perempuan tidak diberi kesempatan namun kepada pilihan baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Menurut wilayah tempat tinggal, APM perkotaan dan perdesaan terdapat sedikit perbedaan yang seiring meningkatnya jenjang pendidikan, perbedaan tersebut juga semakin besar, namun hal ini tidak terlihat pada APM SD/ sederajat di perkotaan dan perdesaan yang memiliki nilai cenderung sama. Secara umum APM untuk pendidikan lanjutan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, APM SMP/ sederajat sebesar 79,68 persen, APM SMA/ sederajat sebesar 70,57 persen dan APM PT sebesar 43,99 persen. Untuk daerah perdesaan, APM SMP/ sederajat sebesar 75,18 persen, APM SMA/ sederajat sebesar 65,03 persen dan APM PT sebesar 11,87 persen. Sementara itu pada jenjang SD/ sederajat, APM daerah perdesaan lebih tinggi daripada APM daerah perkotaan yaitu berturut-turut 99,31 persen dan 97,74 persen.

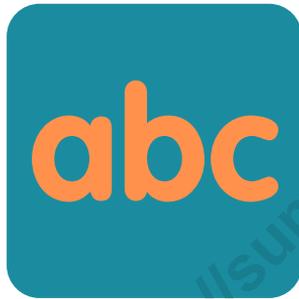
# HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



angka putus sekolah tingkat pendidikan  
rata rata lama sekolah angka melek huruf

**AMH 15 +**

**99,07  
persen**



*" masih ada 1  
dari 100  
penduduk  
usia  
15 tahun  
keatas yang  
tidak bisa  
baca tulis"*

**RLS 15 +**

**9,10 Tahun**

*"rata rata lama  
sekolah  
penduduk usia  
15 tahun keatas  
setara dengan  
kelas 3 SMP"*





## BAB 4

### HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan katalisator dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, seperti yang tertera pada Nawacita ke lima. Adapun beberapa sasaran pembangunan pendidikan yang ingin dicapai pada RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf;
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja yang ditandai meningkatnya;

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan target yang harus dicapai setiap tahunnya selama 2016-2021. Sehingga tujuan pembangunan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi untuk semua dapat tercapai.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi

yang ditamatkan. Disamping itu angka putus sekolah juga akan disajikan untuk melihat di jenjang pendidikan mana pembangunan pendidikan terkendala.

#### 4.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan perentase penduduk yang mampu membaca dan menulis minimal dalam kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AMH diharapkan dapat mengukur seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri,

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2018**

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Kelompok Umur (tahun)					
	10-14	15-24	25-44	45 +	10 +	15 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Perkotaan</b>						
Laki-Laki	98,18	99,87	99,88	98,91	99,39	99,55
Perempuan	99,81	99,91	99,99	97,86	99,28	99,21
Laki-Laki + Perempuan	99,02	99,89	99,93	98,36	99,34	99,38
<b>Perdesaan</b>						
Laki-Laki	99,27	99,49	99,83	98,79	99,37	99,38
Perempuan	99,33	99,92	99,75	95,78	98,40	98,26
Laki-Laki + Perempuan	99,30	99,70	99,79	97,21	98,88	98,81
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>						
Laki-Laki	98,82	99,66	99,85	98,84	99,38	99,46
Perempuan	99,54	99,92	99,86	96,68	98,79	98,69
Laki-Laki + Perempuan	99,18	99,79	99,86	97,70	99,08	99,07

Sumber: Susenas Maret 2018

keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu AMH menjadi salah satu indikator pencapaian target SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kondisi keaksaraan di Sumatera Barat ditunjukkan pada Tabel 4.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang berumur 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan hasil Susenas Maret 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 99,08 persen, sedangkan untuk yang berumur 15 tahun ke atas sebesar 99,07 persen. Dibandingkan mengalami tahun sebelumnya, AMH 10 tahun ke atas dan 15 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen. Ini terlihat proporsi penduduk muda dibandingkan yang lebih tua tidak terlalu berbeda.

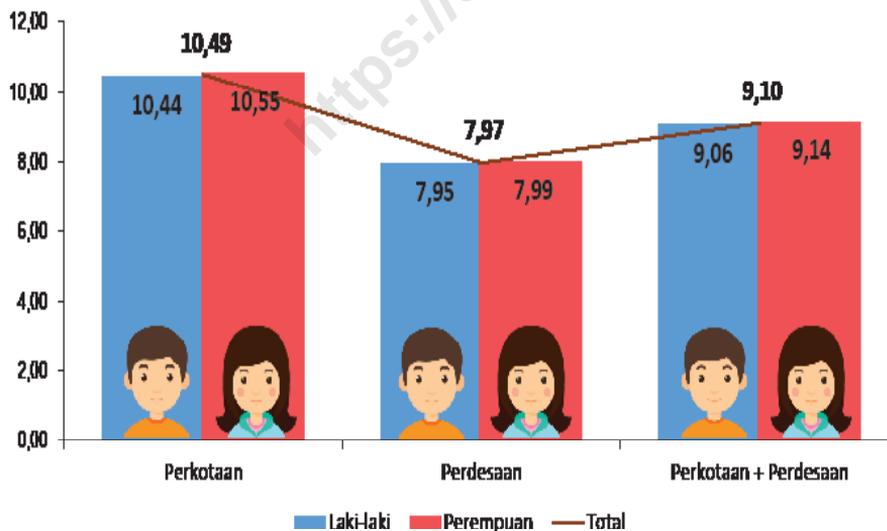
Pencapaian AMH usia 45 tahun ke atas sudah cukup baik yaitu 97,70 persen. Melalui pencapaian ini, diharapkan kemampuan literasi penduduk Indonesia terhadap informasi yang tersedia semakin meningkat tajam, tidak hanya sekedar membaca tanpa meresapi dan memahami apa yang mereka baca. Dalam pembangunan berkelanjutan, kemampuan literasi penduduk bersifat *multiple effect*, di mana hal tersebut akan berdampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 98,88 persen, lebih rendah dibandingkan daerah

perkotaan sebesar 99,34 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur lainnya terlihat persentase penduduk yang melek huruf di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, AMH 10 tahun ke atas yang berjenis kelamin perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan Tabel 4.4, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memacu peningkatan AMH 10 tahun ke atas yakni penduduk di perdesaan dan penduduk perempuan.

#### 4.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata



Sumber: Susenas Maret 2018

**Gambar 4.2. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2018**

lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

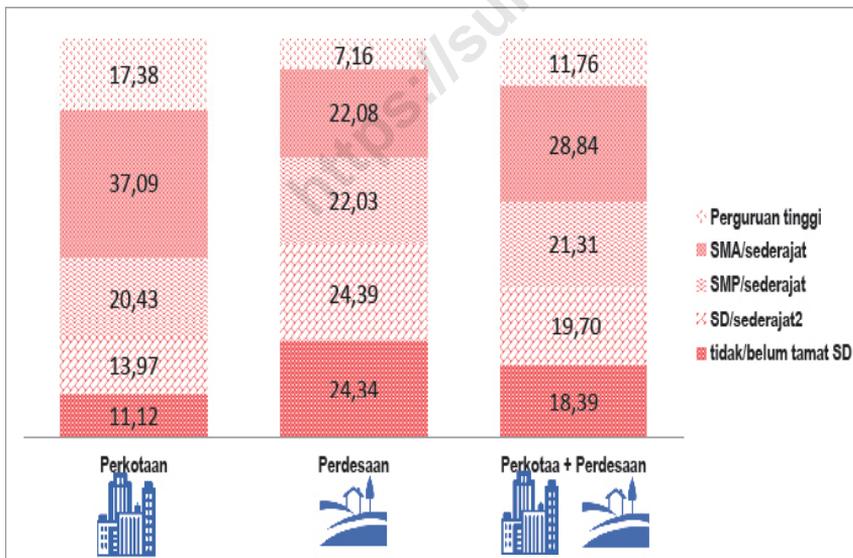
Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,72 tahun dapat dicapai pada tahun 2018. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2018 mencapai 9,10 tahun (setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat). Angka ini sudah cukup jauh dari target RPJMN pada tahun 2018. Hal ini berarti usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengenyam pendidikan sudah menampakkan hasil.

Gambar 4.2 juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti antara rata-rata lama sekolah yang dicapai antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (relatif sama yaitu lebih dari 9 tahun). Kondisi ini menunjukkan secara umum isu gender bukanlah menjadi isu kesenjangan. Rata-rata lama sekolah penduduk di perkotaan sebesar 10,49 tahun dan di

perdesaan sebesar 7,97 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SMP (kelas IX) bahkan lebih, sedangkan di perdesaan secara rata-rata baru menamatkan pendidikan dasar (kelas 6 SD).

### 4.3. Pendidikan Tertinggi yang DiTamatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dicapai dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Gambaran kualitas Sumber Daya Masyarakat

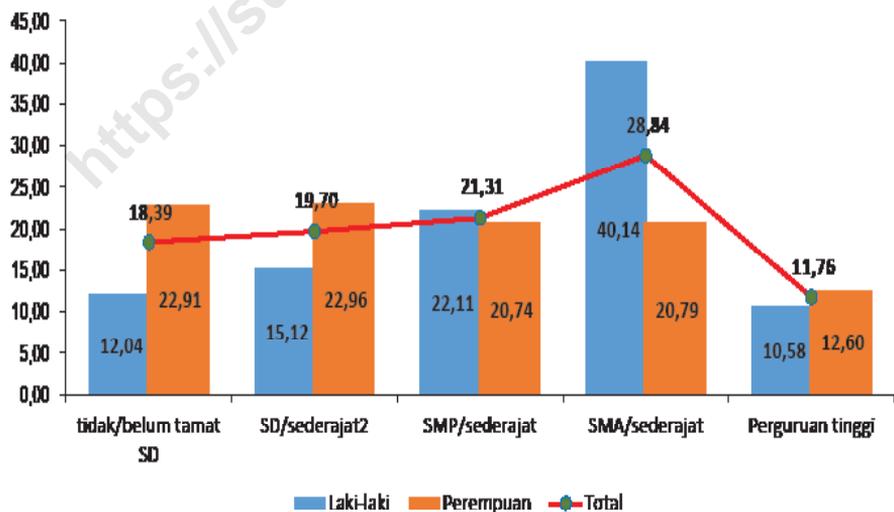


Sumber: Susenas Maret 2018

**Gambar 4.3.1** Persentase Peduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2018

(SDM) Sumatera Barat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada Gambar 4.3.1 dan Gambar 4.3.2 berturut-turut menurut daerah tempat tinggal dan menurut jenis kelamin.

Dari Gambar 4.3.1 tersebut terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SMA/ sederajat sebesar 28,84 persen, diikuti tamat SMP/ sederajat sebesar 21,31 persen, dan tamat SD/ sederajat sebesar 19,70 persen, sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 11,76 persen. Persentase penduduk di perdesaan yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di perdesaan sebagian besar hanya tamatan SD (24,39 persen), sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA/



Sumber: Susenas Maret 2018

**Gambar 4.3.2 Persentase Peduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2018**

Sederajat (37,09 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya proporsi penduduk perempuan dibandingkan laki-laki yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD dan tamat SD. Persentase perempuan yang belum pernah atau tidak tamat pendidikan SD sebesar 22,91 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki sebesar 12,04 persen. Kondisi yang sama juga terlihat pada persentase perempuan yang tamat SD/sederajat. Sedangkan persentase perempuan yang menamatkan SMP/sederajat (20,74 persen) dan SMA/sederajat (20,79 persen) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Sementara untuk jenjang perguruan tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat PT lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Masing-masing sebesar 10,58 persen untuk laki-laki dan 12,60 persen untuk penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan Sumatera Barat relatif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pencapaian pendidikan lanjutan dibandingkan laki-laki.

#### **4.4. Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya (BPS, 2009). Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Misalkan faktor kurangnya motivasi anak untuk bersekolah atau masalah

keterbatasan ekonomi antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/mengurus rumah tangga, tidak tersedianya fasilitas pendidikan memadai, lokasi jauh dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan alasan yang biasa dijumpai di kalangan masyarakat.

Tabel 4.4 menyajikan angka putus sekolah menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga yang digolongkan ke dalam golongan pengeluaran rendah, menengah dan tinggi serta menurut jenjang pendidikan. Dilihat menurut jenjang pendidikan, makin tinggi jenjang pendidikan, makin tinggi pula angka putus sekolah. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan

**Tabel 4.4. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Sumatera Barat, 2018**

Tipe daerah / Status ekonomi rumah tangga	Putus Sekolah		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>	<b>0,71</b>	<b>2,15</b>	<b>4,67</b>
40 % terendah	0,46	2,05	11,65
40 % sedang	0,87	2,43	3,30
20 % tinggi	0,92	1,75	0,90
<b>Perdesaan</b>	<b>0,26</b>	<b>2,80</b>	<b>3,05</b>
40 % terendah	0,33	2,92	2,62
40 % sedang	0,19	2,51	3,29
20 % tinggi	0,13	3,25	3,93
<b>Perkotaan dan perdesaan</b>	<b>0,45</b>	<b>2,51</b>	<b>3,81</b>
40 % terendah	0,37	2,60	5,59
40 % sedang	0,48	2,47	3,29
20 % tinggi	0,64	2,33	1,72

Sumber: Susenas Maret 2018

yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah. Renstra Kemendikbud memiliki target angka putus sekolah hanya sebesar satu persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA). Jenjang pendidikan SD sudah mencapai target tersebut (0,45 persen), sementara angka putus sekolah SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat masih belum dapat mencapai target tersebut. Angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat sebesar 2,51 persen dan di jenjang SMA/ sederajat sebesar 3,81 persen.

Kenaikan angka putus sekolah dari jenjang SD sampai SMA juga terlihat di hampir semua golongan pengeluaran. Ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sementara apabila dilihat menurut golongan pengeluaran dan wilayah tempat tinggal, pola angka putus sekolah di daerah perkotaan pada jenjang pendidikan SD berbeda dengan angka putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA. Angka Putus Sekolah SD di daerah perkotaan tertinggi pada golongan pengeluaran rendah. Sedangkan pada jenjang SMP dan SMA, angka putus sekolah di daerah perkotaan tertinggi pada golongan pengeluaran menengah dan tinggi. Untuk daerah perdesaan, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA tertinggi pada kelompok pengeluaran rendah.

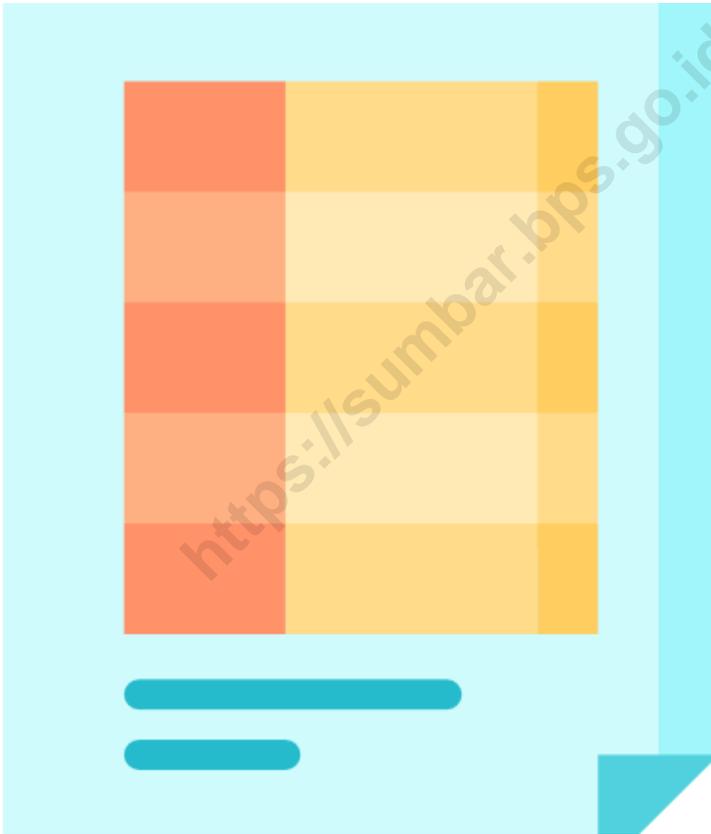
Tingginya angka putus sekolah pada kelompok pengeluaran rendah, sangat memprihatinkan karena pemerintah telah banyak meluncurkan program bantuan, yang bertujuan untuk menjaga agar anak-anak tetap bersekolah terutama yang berasal dari kelompok pengeluaran rendah. Misalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH),

Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah. Tingginya angka putus sekolah di golongan pengeluaran rendah juga mencerminkan bahwa program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar ternyata belum sepenuhnya terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas.

<https://sumbar.bps.go.id>



# PENUTUP





## BAB 5 PENUTUP

Beberapa catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Barat guna penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan ke depan, yaitu:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (3-6 tahun) baru mencapai 37,19 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu.
2. Angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Provinsi Sumatera Barat, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Kesenjangan yang terjadi sebagai akibat rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di daerah perdesaan.
3. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Sumatera Barat hingga tahun 2018 semakin menurun yakni 0,93 persen. Sebagian besar penduduk buta huruf terdapat di daerah perdesaan.
4. Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatera Barat pada tahun 2018 sebesar 9,10 tahun (setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat).
5. Angka Putus Sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMA di daerah perkotaan yaitu 4,67 persen

sementara di perdesaan sebesar 3,05 persen.

6. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA untuk golongan pengeluaran menengah ke atas lebih rendah dibandingkan angka putus sekolah pada golongan pengeluaran rendah.

<https://sumbar.bps.go.id>

# DAFTAR PUSTAKA





## BAB 5 PENUTUP

BPS. 2017. Potret Pendidikan Indonesia. Statistik Pendidikan 2017. Jakarta

BPS. 2018. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2017. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2017. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2016. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2018. Statistik Pendidikan. Jakarta

BPS. 2010. Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009 (Kajian Indikator). Jakarta: CV. Nario Sari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Rencana Strategis Kementerian.

Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Jakarta: Kemdikbud.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

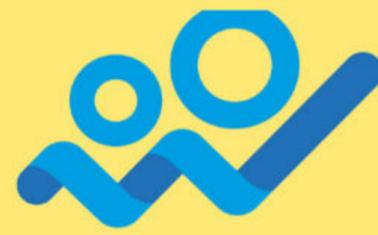
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Unicef Indonesia. 2012. Kajian Ringkas Edisi Oktober 2012: Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini, Jakarta.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). 2009. Education Indicators Technical Guidelines.

<https://sumbar.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No.48 Padang, 25135

Telp (0751) 442158, 442159

Email: [sumbar@bps.go.id](mailto:sumbar@bps.go.id)

Homepage: <https://sumbar.bps.go.id>

ISBN 978-602-6544-58-2



9 786026 544582